

TRANSFORMASI KURIKULUM PEMBELAJARAN SEJARAH PADA JENJANG SMK DALAM MEMUJUDKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA

Setiawan Adi Nugroho ¹

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

adi.nugroho.setiawan@gmail.com

Abstrak: Transformasi Pembelajaran Sejarah Indonesia di jenjang SMK/MAK selalu mengalami dinamika dengan adanya revisi kurikulum. Seperti diketahui bahwasanya awal penerapan Kurikulum 2013, Sejarah Indonesia mendapatkan tempat istimewa pada jenjang SMK/MAK, namun seiring perkembangan waktu, terjadi revisi yang dilakukan terhadap Kurikulum 2013 yang berdampak pada keberadaan mata pelajaran Sejarah Indonesia yang semakin berkurang jumlah jamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sejarah Indonesia pada awal penerapan Kurikulum 2013 mendapatkan alokasi waktu 216 jam pelajaran, semakin berkurang menjadi 144 jam pelajaran setelah terjadi revisi kurikulum pada 2016 dan semakin berkurang lagi menjadi 108 jam pelajaran serta perubahan kodenklatur dari Sejarah Indonesia menjadi sejarah setelah perbaikan struktur kurikulum untuk SMK/MAK pada tahun 2017. Di dalam kurikulum merdeka yang di terapkan di tahun 2022 sejarah mendapatkan porsi di kelas X dan XI. Diharapkan melalui pembelajaran sejarah baik melalui konten isi dan proses pembelajaran serta relevansinya terhadap Pancasila maka terbentuknya Profil Pelajar Pancasila menjadi keniscayaan.

Kata Kunci: kata kunci_1; Kurikulum_2; Pembelajaran Sejarah_3; SMK_4; Pelajar Pancasila_5

Pendahuluan

Pembelajaran sejarah memiliki peran yang sangat penting di dalam pembentukan watak, sikap dan perkembangan bangsa yang bermakna dalam pembentukan bangsa Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan, intelektual, menghargai perjuangan bangsanya dan rasa nasionalisme. Menurut Sapriya (2012:209) pembelajaran sejarah memiliki cakupan materi sebagai berikut: (1) mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik; (2) memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa termasuk peradaban bangsa Indonesia; (3) menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta

solidaritas untuk menjadi pemersatu bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi; (4) memuat ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari; (5) menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Terkait dengan hal tersebut di atas, pemerintah mencoba untuk memperbaiki kurikulum yang sedang berjalan yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013. Dalam pengembangannya Kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar mulai diterapkan pada tahun 2022 sampai 2024. Kurikulum Merdeka Belajar ini diterapkan kepada semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nama lain dari Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum prototipe. Kurikulum Merdeka Belajar diterapkan sebagai lanjutan dan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2013 (K-13). Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pendekatan yang dilakukan agar peserta didik bisa memilih sendiri pelajaran yang diminati. Fokus dari Kurikulum Merdeka Belajar adalah materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikannya. Selain itu, Kurikulum Merdeka Belajar menjalankan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, mendalam, tidak terburu-buru dan bermakna.

Profil pelajar Pancasila merupakan program dari Kemendikbud Ristek untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar. Landasan filosofis profil pelajar Pancasila adalah pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Pemikiran beliau tentang konsep pendidikan "*ing ngarso sung tulandha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*". Konsep tersebut pula yang mengilhami munculnya merdeka belajar. Diantara konsep merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila saling beririsan. Dalam konsep merdeka belajar para pesertadidik diberikan kebebasan untuk memilih materi yang disukai dan diminatinya. Sementara pendidik berperan menjadi pribadi yang bertanggungjawab membentuk karakter peserta didik. Pendidik menjadi teladan ketika berada di depan, menjadi motivator ketika di tengah, dan menjadi pendorong ketika dibelakang agar peserta didik mandiri. Karakter yang diharapkan adalah pelajar yang memiliki jiwa-jiwa Pancasila di dalam dirinya (Rahayuningsih, 2022).

Pelajar Pancasila didesain guna menjawab pertanyaan tentang luaran yang dihasilkan dari sistem pendidikan Indonesia. Kondisi di lapangan menunjukkan fakta-fakta yang memprihatinkan terkait pengamalan nilai-nilai pancasila di kalangan generasi muda. Penelitian dari Nurjanah (2017) menunjukkan mudarnya nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar yang dibuktikan dengan ketidapahamannya terhadap

sejarah dan filosofi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Konsekuensinya para pelajar belum mengetahui hakikat nilai dari setiap sila Pancasila. Penelitian dari Nisa', Fatihatun, Rizqi, & Berlianti (2021) menunjukkan telah terjadi penurunan nasionalisme dan patriotisme di kalangan pelajar sebagai dampak dari globalisasi. Banyak di kalangan pelajar lebih tertarik mengikuti budaya asing dengan alasan lebih modern. Pancasila semakin ditinggalkan sebagai pedoman dan pegangan dalam bertingkah laku. Para pelajar menjadi tidak beretika saat berinteraksi di lingkungan sekolah. Para pelajar kurang mampu menghargai/menghormati orang lain. Kirnandita (2017) juga memberikan fakta-fakta mencengangkan terkait perilaku intoleransi di kalangan pelajar. Salah satu contohnya maraknya perudungan di kalangan pelajar yang berhubungan isu agama. Anak-anak penghayat kepercayaan yang telah memegang KTP sering dirudung karena kolom agama di KTP kosong. Kondisi-kondisi demikian ini jika dibiarkan terus menerus dapat mengancam eksistensi NKRI. Sebagaimana diketahui bersama bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultural. Maka menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar secara struktur dan sistematis perlu dilaksanakan dengan konsekuen.

Sejarah Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran sejarah yang orientasinya membentuk karakter peserta didik. Sejarah dan Pancasila bisa dikatakan saling beririsan. Narasi sejarah banyak mengandung nilai-nilai positif yang mengilhami kelahiran Pancasila. Selain itu juga nilai positif tersebut dapat diwariskan kepada generasi sekarang dan mendatang. Salah satunya dalam rangka membentuk karakter peserta didik yang memiliki jiwa-jiwa Pancasila. Selama ini beberapa fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang belum ideal terkait penyelenggaraan pembelajaran sejarah. Penelitian dari Fibiona, Lestari, & Budianto (2019) menunjukkan jika sejarah bagi generasi millenial merupakan mata pelajaran yang tidak penting untuk dipelajari. Penelitian dari Wasiso, Sukardi, & Winarsih (2020) menunjukkan penyajian materi sejarah di sekolah masih pada tahap mengetahui, belum sampai pada pemahaman konsep dan fakta sejarah, jikalau ada sejarah disajikan terlalu teoritis. Dampaknya para peserta didik sulit untuk mengolah informasi secara kritis dan kreatif. Penelitian dari Labibatussolihah (2019) menunjukkan permasalahan pembelajaran sejarah terletak pada kurang pendidik memanfaatkan strategi, metode, dan model pembelajaran. Dampaknya peserta didik mengalami kesulitan untuk memahami materi sejarah. Konsekuensinya tujuan pembelajaran sulit tercapai. Kondisi-kondisi demikian ini yang membuat eksistensi mata pelajaran sejarah dipertanyakan dan wacana penghapusan dari kedudukannya sebagai mata pelajaran wajib terus berdentung. Padahal tujuan dari pembelajaran sejarah idealnya membentuk peserta didik memiliki kemampuan kognitif yang baik ditopang dengan karakter yang unggul (Tricahyono, 2022). Salah satu kontribusinya dengan mendesain pembelajaran sejarah berbasis kebhineka tunggal ika-an. Pembelajaran sejarah berbasis kebhineka tunggal ika-an secara sederhana dapat dimaknai sebagai bentuk pembelajaran dengan sajian materi di dalamnya

mengandung nilai-nilai multikulturalisme. Nilai-nilai tersebut sebagai modal untuk menguatkan profil pelajar Pancasila.

SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan atau vokasional pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari tingkat SMP sederajat. Penting untuk diketahui bahwa proses pembelajaran pada jenjang SMK lebih menekankan keterampilan dan mata pelajaran produktifnya karena luarannya adalah siap kerja atau berwirausaha. Pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan terdiri dari Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Pada awal peluncuran dan pelaksanaan Kurikulum 2013, mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK memiliki struktur kurikulum dan porsi yang sama seperti di jenjang SMA (Agustinova, 2018). Sekolah SMK memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan SMA. Namun setelah ada revisi porsi mata pelajaran Sejarah Indonesia pun berkurang dari yang awalnya 216 jam pelajaran (JP) dengan perhitungan 2 JP x 6 Semester menjadi 144 jam pelajaran atau 2 JP x 4 semester setelah mengalami revisi kurikulum pada tahun 2016. Setahun kemudian terjadi perubahan kembali pada struktur kurikulum SMK melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan mata pelajaran Sejarah Indonesia mengalami pengurangan lagi menjadi 108 JP atau 3JP x 2 semester. Pada Kurikulum Merdeka pelajaran Sejarah Indonesia dan Sejarah Peminatan dialihkan menjadi mata pelajaran "Sejarah" dan masuk dalam mapel umum. Secara kalkulasi, pada Kurikulum 2013, jam pelajaran Sejarah Indonesia adalah 2 JP dalam satu minggu, sedangkan Sejarah Peminatan adalah 3 JP pada kelas X, dan 4 JP pada kelas XI dan XII, sedangkan pada Kurikulum Merdeka jam Sejarah hanya 2 JP dalam satu minggu.

Tulisan ini ingin melihat bagaimana posisi mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan dinamikanya dari mulai diterapkannya Kurikulum 2013 hingga implementasinya dengan berbagai dinamika yang ada dalam pendidikan vokasi yang penuh dengan perubahan karena tuntutan dunia usaha dan dunia industri (DU-DI) yang menjadi ciri khas dari SMK. Tuntutan zaman juga mendorong terus terjadinya perubahan-perubahan dalam spektrum keahlian dan spektrum kurikulum pada jenjang SMK. Mata pelajaran Sejarah Indonesia butuh dipelajari untuk menunjukkan identitasnya sebagai suatu bangsa di tengah-tengah era Revolusi Industri 4.0 yang saat ini dihadapi. Hal ini sejalan dengan pendapat Naredi (2016) yang menyampaikan bahwa pembelajaran sejarah memiliki tujuan untuk mengenalkan karakteristik dan identitas bangsanya dalam rangka membentuk suatu nation and character building dan menjadi sumber

inspirasi tumbuhnya sense of pride (rasa kebanggaan) dan sense of obligation (rasa kewajiban) terhadap bangsa dan negaranya. Lebih lanjut lagi, identitas tersebut menjadikan sebuah bangsa bersatu dan mewujudkan integrasi nasional. Dengan mempelajari sejarah, nantinya akan tumbuh rasa cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia yang dampak jangka panjangnya adalah integrasi nasional bangsa Indonesia dapat tetap terjaga (Gunawan, 2016). Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan dari Naredi dan Gunawan di atas, maka mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK tetap penting dipelajari di era Revolusi Industri 4.0 yang saat ini dihadapi, yakni untuk menunjukkan identitasnya sebagai suatu bangsa hingga akhirnya integrasi nasional bangsa Indonesia dapat tetap terjaga.

Metode

Sejak penelitian dan penulisan sejarah dilakukan secara ilmiah maka penelitian dan penulisan sejarah menggunakan metode sejarah. Metode itu sendiri berarti suatu cara, prosedur, atau teknik untuk mencapai sesuatu tujuan secara efektif dan efisien. Metode, karenanya, merupakan salah satu ciri kerja ilmiah. Metode harus dibedakan dengan metodologi. Apabila metodologi sebagai "Science of Methods" lebih banyak berkaitan dengan kerangka referensi, maka metode bersifat lebih praktis; ialah memberikan petunjuk mengenai cara, prosedur, atau teknik pelaksanaannya secara sistematis. Metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Sjamsuddin, 2012).

Pada tahap heuristik atau pengumpulan data, peneliti melakukan pencarian sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelusuran sumber dilakukan melalui penelitian di perpustakaan, literatur diperoleh melalui studi pustaka di perpustakaan SMK Kesehatan Purworejo, melakukan wawancara mendalam terhadap ketua MGMP Sejarah SMK Kabupaten Purworejo, Anggota AGSI (Asosiasi Guru Sejarah Indonesia) Provinsi Jawa Tengah serta wawancara kepada Waka Kurikulum SMK di Kabupaten Purworejo.

Tahap selanjutnya yaitu tahap kritik intern dan ekstern dilakukan dengan membuat perbandingan dari beberapa sumber dan membandingkannya dengan fakta-fakta yang ada sebelumnya. Tahap selanjutnya yakni interpretasi atau penafsiran berdasarkan sumber yang telah didapat, dilakukan berdasarkan fakta dan juga data yang diperoleh sehingga tidak hanya imajinasi semata untuk itu peneliti mencantumkan sumber data yang digunakan. Pada tahap interpretasi sumber-sumber primer yang telah didapatkan dilakukan komparasi dengan sumber-sumber lain baik sekunder ataupun tersier. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan pemaknaan. Pada

tahap interpretasi ini peneliti berusaha untuk mengkaitkan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya, sehingga diperoleh sebuah gambaran peristiwa secara utuh dan kronologis serta saling berkaitan.

Tahap terakhir dalam metode ini yakni historiografi yaitu penulisan. Penulisan sejarah disusun secara kronologis dan memperhatikan aspek kausalitas. Pembahasan mengenai implementasi kurikulum 2013 yang memuat pelajaran Sejarah Indonesia pada jenjang pendidikan SMK dengan porsi yang sama dengan SMA/MA, namun dalam perjalanannya mengalami perubahan yang mana pelajaran sejarah Indonesia terus berkurang alokasi waktu pada revisi terakhir 2017 untuk jenjang SMK/MAK. Dan sejak di berlakukannya kurikulum merdeka tahun 2022 berganti nama menjadi sejarah untuk jenjang SMK/MAK.

Dengan menggunakan metode sejarah, penulis mendapatkan panduan bagaimana secara teknis artikel ini dapat dikerjakan secara efektif dan akurat. Penulis menggunakan term kurikulum 2013 mulai dari pertama kali diterapkan pada tahun 2013 sampai dengan revisi terakhir pada tahun 2022 yang memberikan perubahan drastis pada mata pelajaran Sejarah Indonesia pada jenjang SMK/MAK.

Hasil dan Pembahasan

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Sulaiman, 2012). Berdasarkan pengertian tersebut di atas, setidaknya terdapat dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Kurikulum 2013 yang diberlakukan pertama kali mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi kedua dimensi tersebut di atas. Sebelum dilakukan analisis terkait dinamika mata pelajaran Sejarah Indonesia di dalam Kurikulum 2013, perlu kiranya dilihat terlebih dulu mengapa KTSP harus diganti dengan Kurikulum 2013 terlepas dari soal pro dan kontra di lapangan, Kurikulum 2013 secara konsep layak untuk dilaksanakan namun disayangkan dalam penerapannya terkesan tergesa-gesa sehingga kesiapan-kesiapan menjadi kurang matang, termasuk penyiapan guru dan bahan ajarnya (Sardiman, 2015). Lalu mengapa Kurikulum 2013 dikembangkan dan diterapkan di Indonesia? Hal ini dikarenakan penyempurnaan kurikulum adalah sebuah keniscayaan dan keharusan, mengingat adanya tantangan baru, baik secara internal maupun eksternal.

Pelajaran Sejarah Indonesia dalam Kurikulum 2013 Awal

Pengembangan Kurikulum 2013 diawal diharapkan dapat mewujudkan kompetensi lulusan yang mampu memahami dan mencari solusi berbagai permasalahan yang terkait dengan berbagai tantangan. Misalnya kompetensi yang terkait dengan kemampuan berpikir jernih dan mendasarkan pada pertimbangan moral, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, atau memiliki kecerdasan intelektual, sosial/emosional dan spiritual, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab serta peduli dan toleran terhadap sesama dan lingkungan.

Struktur kurikulum untuk Sejarah Indonesia di SMK/MAK berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan menjelaskan bahwa mata pelajaran sejarah yang terbagi menjadi dua, yakni Sejarah Indonesia (kelompok wajib) dan Sejarah Peminatan (kelompok minat) untuk di jenjang SMK/MAK hanya menerapkan mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan porsi untuk SMK/MAK sederajat sama dengan jenjang SMA/MA sederajat yakni 2 jam pelajaran per minggu dan diberikan di kelas X, XI, dan XII.

Dari isi Permendikbud di atas, dapat disimpulkan artinya untuk SMK/MAK mata pelajaran Sejarah Indonesia mendapatkan jumlah total 216 jam pelajaran selama enam semester atau tiga tahun belajar di SMK/MAK. Dengan kondisi seperti itu, artinya pembelajaran Sejarah Indonesia di SMK/MAK tidak ada bedanya sama sekali dengan di SMA/MA. Berikut ini tersaji gambar tabel struktur Kurikulum 2013 awal untuk SMK/MAK.

Struktur kurikulum SMK/MAK terbagi dalam tiga kelompok, yaitu Kelompok A (Wajib), Kelompok B (Wajib), dan Kelompok C (Peminatan), istilah ini menggantikan istilah lama di SMK dengan sebutan kelompok mata pelajaran Adaptif, Normatif, dan Produktif. Mata pelajaran Sejarah Indonesia dalam Kurikulum 2013 awal termasuk kedalam rumpun mata pelajaran Kelompok A (Wajib) bersamaan dengan lima mata pelajaran lainnya yakni Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris. Alokasi waktu untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia yakni 2 jam pelajaran per minggu dan diberikan di kelas X, XI, dan XII. Satu jam pelajaran perminggunya adalah 45 menit, alokasi waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk Sejarah Indonesia di SMK/MAK ini tidak ada bedanya sama sekali dengan alokasi waktu Sejarah Indonesia yang diterapkan di sekolah umum SMA/MA. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah ingin membangun masyarakat yang mampu berpikir kritis dan mewujudkan cita-cita pendidikannya melalui peserta didik yang belajar dari sejarah.

Struktur Kurikulum SMK/MAK merupakan pengorganisasian atas kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada setiap SMK/MAK dirancang dengan pandangan bahwa SMA/MA dan SMK/MAK pada dasarnya adalah pendidikan menengah, pembedanya hanya pada pengakomodasian minat peserta didik saat

memasuki pendidikan menengah. Oleh karena itu, struktur umum SMK/MAK sama dengan struktur umum SMA/MA, yakni ada tiga kelompok Mata pelajaran: Kelompok A, B, dan C.

Setelah mengetahui struktur kurikulum Sejarah Indonesia di SMK/MAK, pemerintah membagi organisasi materi dalam Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia. terdapat istilah baru untuk menggantikan istilah dari Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yakni dengan Kompetensi Inti (KI) dengan Kompetensi Dasar (KD). Dalam Kurikulum 2013 ini, pemerintah membuat empat KI yang nantinya dikembangkan dalam beberapa KD. Adapun KI-KD dan pengorganisasian materi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Materi Sejarah Indonesia Kurikulum 2013

Organisasi Materi Berdasarkan KI-KD Kurikulum 2013		
Awal		
Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
KI 1 berjumlah 2 KD KI 2 berjumlah 3 KD KI 3 berjumlah 8 KD KI 4 Berjumlah 8 KD	KI 1 berjumlah 1 KD KI 2 berjumlah 5 KD KI 3 berjumlah 11 KD KI 4 Berjumlah 11 KD	KI 1 berjumlah 1 KD KI 2 berjumlah 3 KD KI 3 berjumlah 9 KD KI 4 Berjumlah 9 KD
Materi: 1. Konsep berpikir diakronik, sinkronik, ruang, waktu dalam sejarah 2. Masa praaksara 3. Masa Hindu-Buddha 4. Masa Kerajaan Islam	Materi: 1. Kolonialisme Barat di Indonesia 2. Pergerakan Nasional 3. Proklamasi 4. Revolusi Kemerdekaan	Materi: 1. Disintegrasi Bangsa 2. Demokrasi Liberal 3. Demokrasi Terpimpin 4. Orde Baru 5. Reformasi 6. Peran Indonesia dalam

Hasil dan bagian pembahasan memuat temuan penelitian yang diperoleh dari data dan hipotesis penelitian, pembahasan hasil penelitian dan perbandingan dengan teori serupa dan/atau penelitian sejenis.

Secara substansial, KI didesain dalam empat kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap spiritual KI-1, sikap sosial KI-2, pengetahuan KI-3, dan keterampilan/penerapan pengetahuan KI-3. Sedangkan Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar adalah kompetensi dan konten yang juga terkait dengan aspek spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan ketrampilan yang bersumber pada Kompetensi Inti yang harus dikuasai peserta didik. Menarik untuk melihat KD yang terdapat di kelas XI bagaimana pemerintah dalam Kurikulum 2013 tidak mencantumkan secara tersurat materi Pendudukan Jepang di Indonesia.

Kurikulum 2013 dalam Sejarah Indonesia juga dari KI dan KD terlihat lebih

menekankan pengembangan pemikiran kritis-kreatif dan inovatif bagi peserta didik. Peserta didik juga dikembangkan rasa ingin tahu, peserta didik tidak lagi harus diberi tahu atau menerima pengetahuan tetapi bagaimana mereka itu dilatih mencari dan menemukan pengetahuan. Sumber belajar tidak hanya terbatas guru tetapi bisa siapa dan apa saja yang relevan. Tempat pembelajaran tidak terbatas di ruangan kelas tetapi di masyarakat dan lingkungan alam. Oleh karena itu, secara metodologis, dalam pembelajaran pada Kurikulum 2013 menekankan pendekatan saintifik. Pada peserta didik dikembangkan kemampuan mengamati dan menanya, kemampuan mengumpulkan informasi, berikut mengasosiasi atau mengolah informasi sampai menarik kesimpulan dan kemudian mengkomunikasikan hasil.

Pelajaran Sejarah Indonesia dalam Kurikulum 2013 Revisi 2016

Selang tiga tahun setelah berjalannya Kurikulum 2013 pada awal tahun ajaran baru 2013/2014 berjalan ditambah dengan masih diwarnai pro-kontra atas penerapan Kurikulum 2013, pada tahun 2016 pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan revisi terhadap Kurikulum 2013 dalam beberapa aspek. Setidaknya terdapat empat aspek yang direvisi pada tahun 2016 yakni: *Pertama*, Penataan KI 1 dan KI 2. *Kedua*, Koherensi KD pada setiap mata pelajaran. *Ketiga*, Pendekatan Saintifik yang lebih luwes. *Keempat*, menata taksonomi berpikir yang lebih fleksibel.

Aspek kedua dalam hal menata keselarasan KD berdampak langsung kepada mata pelajaran sejarah. Medio tahun 2016 keluarlah Permendikbud No. 24 Tahun 2016 menjelaskan bahawasanya mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK masih tetap 2 jam pelajaran perminggu namun hanya diberikan di kelas X dan XI saja. Hal ini menjadi permasalahan di lapangan dalam hal implementasi Kurikulum 2013 revisi 2016, kekisruhan ini dikarenakan pemerintah tidak memberikan rambu-rambu yang jelas dalam pelaksanaan kurikulum revisi di SMK untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia karena perubahan struktur kurikulum untuk Sejarah Indonesia tidak dibarengi dengan perangkat yang lengkap. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan kurikulum revisi namun Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) tidak ada perubahan dan masih disamakan dengan jenjang SMA/MA sederajat. Hal ini tentu saja menjadi masalah karena secara tidak langsung materi dalam mata pelajaran sejarah terpotong begitu saja di kelas XI, karena di kelas XII peserta didik tidak mendapatkan mata pelajaran Sejarah Indonesia.

Struktur kurikulum SMK/MAK masih terdapat kesamaan dengan struktur kurikulum pada Permendikbud No. 70 Tahun 2013 yakni terbaginya mata pelajaran dalam tiga kelompok, yaitu Kelompok A (Wajib), Kelompok B (Wajib), dan Kelompok C (Peminatan). Namun hasil dari revisi pemerintah terhadap Kurikulum 2013 untuk SMK membuat alokasi waktu untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia berkurang dari yang awlanya 216 jam pelajaran berkurang menjadi 144 jam pelajaran yakni 2 jam pelajaran

per minggu dan hanya diberikan di kelas X dan XI. Jelas terdapat alasan mengenai berkurangnya alokasi jam untuk Sejarah Indonesia di SMK/MAK, karena pemerintah pada tahun 2016 sedang menggencarkan program revitalisasi SMK/MAK yang mana ini berimbas ditambahnya alokasi jam mata pelajaran Kelompok C (Peminatan) dan mengurangi jam pada kelompok A dan B termasuk Sejarah Indonesia didalamnya.

Selain hal tersebut di atas, berubahnya Kurikulum 2013 revisi 2016 membawa dampak terhadap organisasi materi untuk kelas XI (sebelas). Pada Kurikulum 2013 awal KD untuk kelas XI yang awalnya 11 KD mengalami perubahan menjadi 10 KD, namun pengurangan KD ini justru menambah materi yang sebelumnya tidak ada pada Kurikulum 2013 awal yakni materi "Pendudukan Jepang". Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Materi Sejarah Indonesia Kurikulum 2013 Revisi 2016
 Organisasi Materi Berdasarkan KI-KD Kurikulum 2013 Revisi 2016

Kelas X	Kelas XI
KI 3 berjumlah 8 KD KI 4 berjumlah 8 KD	KI 3 berjumlah 10 KD KI 4 berjumlah 10 KD
Materi: 1. Konsep berpikir diakronik, sinkronik, ruang, waktu dalam sejarah 2. Masa praaksara 3. Masa Hindu-Buddha 4. Masa Kerajaan Islam	Materi: 1. Kolonialisme Barat di Indonesia 2. Pergerakan Nasional 3. Pendudukan Jepang di Indonesia 4. Proklamasi 5. Revolusi Kemerdekaan

Pelajaran Sejarah dalam Kurikulum 2013 revisi 2017

Revisi Kurikulum 2013 pada tahun 2017 ini nampaknya hanya berlaku bagi jenjang SMK/MAK, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 180/D/KEP/KR/2017 disana menyebutkan bahwa Sejarah Indonesia dalam struktur kurikulum di SMK berkurang menjadi 108 jam atau 3JP x 2 semester artinya Sejarah Indonesia hanya diberikan kepada peserta didik pada jenjang kelas X saja. Berbeda dengan Permendikbud No. 24 tahun 2016 yang tidak mengatur mengenai KI- KD Sejarah Indonesia untuk SMK, pada SK Dirjen Dikdasmen mengatur KI-KD menjadi 2 KI dan 13 KD saja.

Nama mata pelajaran Sejarah Indonesia berubah nomenklatur menjadi Sejarah. Hasil revisi tahun 2017 untuk jenjang SMK membuat alokasi waktu untuk mata pelajaran Sejarah pun berkurang kembali dari yang awalnya 144 jam pelajaran berkurang menjadi 108 jam pelajaran yakni 3 jam pelajaran per minggu dan hanya diberikan di kelas X saja. Pengorganisasian materipun otomatis mengalami perubahan, dari yang awalnya diajarkan di kelas X dan XI, dengan aturan baru ini menjadi hanya di kelas X

dengan dengan total 13 KD. 13 KD yang dirancang oleh pemerintah rupanya mencakup semua materi dari kelas X- XII pada kurikulum 2013 awal dengan pemadatan materi dan lebih mengedepankan makna bukan lagi hapalan periodesasi.

Tabel 3. Materi Sejarah Indonesia Kurikulum 2013 Revisi 2017

Materi Berdasarkan KI-KD Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas X
KI 3 berjumlah 13 KD KI 4 berjumlah 13 KD
Materi: 1. Konsep berpikir diakronik, sinkronik, ruang, waktu dalam sejarah 2. Masa praaksara 3. Masa Kerajaan Hindu-Buddha 4. Masa Kerajaan-kerajaan Islam 5. Kolonialisme Barat di Indonesia 6. Pergerakan Nasional 7. Proklamasi 8. Revolusi Kemerdekaan 9. Disintegrasi Bangsa 10. Demokrasi Liberal & Demokrasi Terpimpin 11. Orde Baru & Reformasi 12. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia Pengembangan IPTEK dari Kemerdekaan-Reformasi

Pelajaran Sejarah dalam Kurikulum Merdeka Belajar 2022

Kemendikbudristek merinci perbedaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di tiap jenjang pendidikan. Perbedaan ini dapat ditilik berdasarkan kerangka dasar kurikulum, kompetensi yang dituju, struktur kurikulum, pembelajaran, penilaian, perangkat ajar yang disediakan pemerintah, dan perangkat kurikulum masing-masing. Capaian Belajar di SMK dengan Kurikulum Merdeka disusun per fase, yaitu Fase E (umumnya setara dengan kelas X SMK) dan Fase F (umumnya setara dengan kelas XI, XII, dan XIII SMK).

Kompetensi yang dituju pada Kurikulum 2013 yaitu Kompetensi Dasar (KD), dinyatakan dalam poin-poin yang diurutkan untuk mencapai Kompetensi Inti (KI) per tahun. Kompetensi Inti pada Kurikulum 2014 terdiri dari Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan, dan Keterampilan. KD pada KI 1 dan 2 hanya terdapat pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kurikulum Merdeka menyasar Capaian Pembelajaran, disusun per fase, dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan

**Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Profesi Guru
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Vol. 1 , No. 1, 2022, 201
Setiawan Adi Nugroho**

keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Jam Pelajaran (JP) Kurikulum 2013 diatur per minggu dengan alokasi waktu rutin mingguan tiap semester sehingga siswa akan dapat nilai hasil belajar tiap mata pelajaran di akhir tiap semester. Sementara itu, Jam Pelajaran Kurikulum Merdeka diatur per tahun sehingga alokasi waktu untuk mencapai JP bisa fleksibel.

Sekolah dengan Kurikulum 2013 diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis tematik integratif. Sementara itu, sekolah dengan Kurikulum Merdeka dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Ada dua kegiatan utama di struktur Kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran reguler dan protek penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik untuk semua pembelajaran. Sementara itu, Kurikulum Merdeka menggunakan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian siswa.

Pembelajaran Kurikulum 2013 umumnya hanya terfokus pada intrakurikuler (tatap muka), sementara pembelajaran Kurikulum Merdeka menggunakan paduan pembelajaran intrakurikuler (70-80% dari JP) dan kokurikuler (20-30% JP) melalui proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kokurikuler di Kurikulum 2013 mendapat alokasi beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam kegiatan khusus terencana sehingga umumnya diserahkan pada kreativitas guru pengampu.

Tabel 4. Materi Sejarah di Kurikulum Merdeka

No	Elemen	Deskripsi
1.	Keterampilan Konsep Kelas X	Keterampilan Konsep Sejarah (<i>Historical Conceptual Skills</i>) berhubungan dengan konsep-konsep dasar ilmu sejarah, seperti manusia, ruang, waktu, diakronik (kronologi), sinkronik, historiografi, maupun konsep-konsep lain yang berhubungan dengan peristiwa sejarah seperti kolonialisme, imperialisme, pergerakan nasional, proklamasi, orde lama, orde baru, reformasi, dan lain-lain. Keterampilan konsep diperoleh melalui pemahaman akan sebuah konsep, baik dalam dalam lingkup ilmu sejarah maupun lingkup ilmu lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan sebuah peristiwa. Peserta didik tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang definisi konsep, tetapi juga harus tahu bagaimana menggunakan konsep sebagai bahan analisis untuk mengkaji sebuah peristiwa. Pemahaman konsep dibutuhkan untuk memperoleh penjelasan secara lebih luas dan bermakna tentang sebuah peristiwa.

**Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Profesi Guru
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Vol. 1 , No. 1, 2022, 202
Setiawan Adi Nugroho**

2.	Keterampilan Proses Sejarah Kelas X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamati: Peserta didik melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara sengaja dan terencana dengan maksud untuk mendapat informasi dari hasil pengamatan. Pengamatan dapat dilakukan langsung atau menggunakan instrumen lain. 2. Menanya: Peserta didik menyusun pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahuinya dan masalah apa yang ditemukan. Pada tahap ini ia juga menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang sedang diselidiki dengan rumus 5W 1H (apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana), dan memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan jawaban atas pertanyaan. 3. Mengumpulkan Informasi: Peserta didik menyusun langkah-langkah untuk mengumpulkan informasi melalui studi pustaka, studi dokumen, wawancara, observasi, kuesioner, dan teknik pengumpulan informasi lainnya. 4. Mengorganisasikan Informasi: Peserta didik memilih, mengolah dan menganalisis informasi yang diperoleh. Proses analisis informasi dilakukan dengan cara verifikasi, interpretasi, dan triangulasi informasi. 5. Menarik Kesimpulan: Peserta didik menjawab, mengukur dan mendeskripsikan serta menjelaskan permasalahan yang ada dengan memenuhi prosedur dan tahapan yang ditetapkan. 6. Mengomunikasikan: Peserta didik mengungkapkan seluruh hasil tahapan di atas secara lisan dan tulisan dalam bentuk media digital dan non-digital. Peserta didik lalu mengomunikasikan hasil temuannya dengan mempublikasikan hasil laporan dalam bentuk presentasi digital dan/atau non digital. 7. Merefleksikan dan Merencanakan Proyek Lanjutan Secara Kolaboratif: Peserta didik mampu mengevaluasi pengalaman belajar yang telah dilalui dan diharapkan dapat merencanakan proyek lanjutan dengan melibatkan lintas mata pelajaran secara kolaboratif.
3.	Keterampilan Konsep Kelas XI	<p>Pada akhir fase kelas XI ini, peserta didik mampu mengembangkan konsep sejarah yang dapat digunakan untuk mengkaji peristiwa sejarah; mengidentifikasi kiprah orang-orang atau kelompok masyarakat dalam menciptakan dan</p>

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Profesi Guru
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Vol. 1 , No. 1, 2022, 203
 Setiawan Adi Nugroho

		<p>menggerakkan sejarah; mengidentifikasi peristiwa sejarah di Indonesia serta mengaitkan atau menghubungkannya dengan peristiwa sejarah di dunia pada periode yang sama; mengidentifikasi dan menganalisis pola perkembangan, keberlanjutan, perubahan, dan pengulangan dalam peristiwa sejarah; dan mengembangkan konsep diakronis (kronologi) dan/atau sinkronis untuk mendeskripsikan peristiwa sejarah.</p>
4.	Keterampilan Proses Sejarah Kelas XI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis serta mengevaluasi peristiwa sejarah secara diakronis (kronologi) yang menitikberatkan pada proses dan/atau sinkronis yang menitikberatkan pada struktur; menganalisis serta mengevaluasi peristiwa sejarah berdasarkan hubungan kausalitas; mengaitkan peristiwa sejarah dengan kehidupan sehari-hari; dan menempatkan peristiwa sejarah pada konteks zamannya. 2. Menganalisis serta mengevaluasi peristiwa sejarah dalam perspektif masa lalu, masa kini, dan masa depan; menganalisis serta mengevaluasi peristiwa sejarah dari pola perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan; memaknai nilai-nilai atau hikmah dari peristiwa sejarah. 3. Menganalisis serta mengevaluasi peristiwa sejarah dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global; mengaitkan hubungan antara peristiwa sejarah lokal, nasional, bahkan global. 4. Peserta didik mampu memahami fakta sejarah serta melihat keterkaitan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan; mengaitkan peristiwa sejarah dengan realitas sosial dan mengevaluasi peristiwa sejarah; memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa sejarah; mengembangkan minat untuk memperdalam atau melanjutkan studi ilmu sejarah atau pendidikan sejarah; mengembangkan kepedulian untuk mengunjungi dan menjaga benda-benda atau situs-situs peninggalan sejarah; dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kesejarahan. 5. Peserta didik mampu melakukan penelitian sejarah dengan menerapkan langkah-langkah mencari sumber (heuristik), kritik dan seleksi sumber (verifikasi), analisa dan sintesa sumber (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi); menuliskan biografi tokoh-tokoh sejarah.

		6. Peserta didik mampu membaca buku teks, buku referensi, dan internet; menuliskan dan menuturkan sejarah Indonesia yang berkaitan atau memiliki hubungan dengan sejarah dunia; mengolah informasi sejarah secara non digital maupun digital dalam berbagai bentuk aplikasi sejarah, rekaman suara, film dokumenter, foto, maket, <i>vlog</i> , <i>timeline</i> , <i>story board</i> , infografis, videografis, komik, poster, dan lain-lain.
--	--	---

Pembahasan

Menyikapi Perubahan Kurikulum Sejarah Indonesia di SMK

Perubahan kurikulum merupakan sebuah hal yang wajar dalam dunia pendidikan untuk menjawab perubahan dunia yang terjadi, justru menjadi janggal ketika tidak adanya evaluasi dari kurikulum yang sedang dijalankan. Perubahan pada Kurikulum 2013 juga yang membuat mata pelajaran Sejarah Indonesia menjadi semakin berkurang jalan merupakan bagian dari representasi sebuah kebijakan pemerintah. Perubahan yang terjadi dan berdampak langsung untuk Sejarah Indonesia di SMK merupakan kebijakan publik yang berkaitan dengan kajian pendidikan dan kurikulum tidak akan pernah lepas dari politik kekuasaan, kebijakan ini dengan sendirinya akan berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa kini maupun masa yang akan datang.

Perubahan dalam Sejarah Indonesia sudah barang tentu merupakan tindakan politik kompromistis antara eksekutif dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan legislatif dalam hal ini sebagai representasi dari masyarakat yang dipilih melalui proses pemilihan umum yang demokratis (Zulkarnain, 2018). Terdapat pertanyaan menggelitik, apakah antara pembuat kebijakan dan pengguna kebijakan sudah sinkron dan saling terkait satu dengan yang lainnya? Hal ini menjadi penting dan berkaitan erat karena kurikulum tidak mungkin menjadi sebuah kebijakan publik apabila tidak mendapat dukungan politik.

Mata pelajaran sejarah memuat pelajaran penting bagi umat manusia dari masa ke masa. Posisi penting yang dimiliki oleh mata pelajaran sejarah ini dilandasi oleh kenyataan bahwa mempelajari masa lalu mampu menjadikan pedoman dalam menjalani kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Pentingnya keberadaan mata pelajaran sejarah dalam kurikulum SMK/MAK juga tidak terlepas dari landasan bahwa sejarah mampu mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya (Widja, 2018; Suswandari, 2010; Hasan, 2006).

Apabila melihat dari hasil analisis yang sudah dipaparkan di atas, terdapat penyimpangan secara regulasi pada penerapan Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran

Sejarah pada jenjang SMK/MAK. *Pertama*, bahwa belum adanya landasan hukum yang menyatakan bahwa Permendikbud No. 60 tahun 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi yang pada akhirnya membuat mata pelajaran Sejarah berkuang. *Kedua*, regulasi yang keluar setelah diberlakukannya Permendikbud No. 60 tahun 2014 dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen yang secara tataran hukum memiliki kekuatan lebih rendah dari peraturan menteri.

Ketiga, regulasi yang berupa Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen hanya berlaku pada mata pelajaran kejuruan, sedangkan mata pelajaran Sejarah Indonesia merupakan mata pelajaran kelompok A (umum) yang menjadi wewenang Pusat Kurikulum dan Perbukuan. *Keempat*, mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK/MAK merupakan mata pelajaran wajib dalam kepentingan tujuan pendidikan nasional dalam rangka pembentukan karakter bangsa. *Kelima*, tidak adanya koordinasi antara pemegang kebijakan yang berdampak pada regulasi yang dikeluarkan saling tumpang tindih.

Terlepas dari adanya penyimpangan dalam pengeluaran regulasi Kurikulum 2013 di SMK/MAK untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia, namun dalam tataran praktisnya masih sangat dibutuhkan lebih-lebih apabila dikaitkan dengan kebutuhan praktis masa depan (Zed, 2018). Sejarah tetap diperlukan dalam kehidupan masyarakat global kaitannya dengan penanaman nilai sadar sejarah untuk menumbuhkan kemampuan intelektual yang kritis dan tajam dalam menghadapi situasi yang terus berubah ini. Pemahaman sejarah diyakini dapat memperkokoh tentang kehidupan masa kini. Dengan kata lain, belajar dari masa lampau untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tentunya harus ada perubahan paradigma pembelajaran sejarah dari situasi linier hapalan ke arah pemahaman makna moral kesejarahan dan nilai-nilai yang terkandung dari setiap peristiwa yang terjadi. Keadaan ini memerlukan profesi bermakna dari guru sejarah yang harus benar-benar dari latar belakang pendidikan sejarah, termasuk di dalamnya perangkat pembelajaran di sekolah dan lingkup pendidikan yang lebih luas. Hamid Hasan memberikan pandangan terkait organisasi konten kurikulum pendidikan sejarah yang tidak harus bersifat progresif, melainkan harus menggunakan pendekatan yang dinamakan "*expanding community approach*" (Hasan, 2006). Dengan pendekatan tersebut maka nantinya peserta didik belajar peristiwa sejarah dimulai dari yang paling dekat dengan lingkungannya ke lingkungan yang paling jauh. Dengan demikian maka kurikulum pendidikan sejarah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kajian dalam berbagai tema sejarah dan memiliki kesempatan menggunakan kemampuan sejarah dalam realita kehidupan kesehariannya tidak lagi hanya menghafal rentetan peristiwa saja.

Mata pelajaran Sejarah Indonesia pada jenjang SMK/MAK perlu dikaji ulang agar sesuai dengan target dan tujuan pendidikan nasional. Pada saat yang bersamaan mata pelajaran Sejarah Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pemenuhan wawasan

kebangsaan siswa vokasi. Sejarah merupakan pemahaman akan identitas bangsa dan perkembangannya sepanjang zaman yang menjadi landasan berpikir masyarakat Indonesia.

Simpulan

Sejak awal penerapan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2013/2014 mata pelajaran Sejarah Indonesia mendapatkan porsi yang cukup besar baik di jenjang SMK/MAK apalagi di SMA/MA. Namun tidak lama setelah penerapan Kurikulum 2013 pemerintah melakukan perbaikan atas Kurikulum yang sudah berjalan dengan dalih tuntutan jaman.

Dampak dari revisi Kurikulum 2013 pada tahun 2016 atau lebih dikenal dengan Kurikulum 2013 revisi 2016 membuat mata pelajaran Sejarah Indonesia di jenjang SMK/MAK mengalami perubahan yang cukup mengejutkan bagi kalangan guru sejarah di lapangan. Hal ini dikarenakan pemerintah hanya memberikan pelajaran Sejarah Indonesia di kelas X dan XI tanpa adanya perubahan KI-KD dan membuat materi pelajaran sejarah otomatis terpotong di kelas XI, peserta didik mendapatkan pemahaman yang tidak utuh akan sejarah yang sedang ia pelajari di bangku SMK/MAK.

Setahun kemudian, dengan dalih revitalisasi SMK dan diterapkannya kerjasama dengan DU-DI mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK/MAK mengalami perubahan yang cukup signifikan, dari pertama Kurikulum 2013 mendapatkan alokasi 216 JP, berubah menjadi 144 JP dan di tahun 2017 Sejarah Indonesia hanya mendapatkan alokasi waktu 108 JP dan hanya diajarkan selama dua semester di kelas X dengan pemadatan materi dari kelas X hingga kelas XII.

Pelajaran Sejarah Indonesia di SMK mengalami dua pandangan yang saling bertentangan dalam waktu yang sama. Disatu sisi memiliki peran strategis terutama sebagai sarana pewarisan budaya (*cultural transmission*), penguatan jati diri generasi penerus, sumber edukasi integrasi bangsa. Namun sisi lain pelajaran Sejarah Indonesia dianggap tidak penting mata pelajaran utama (peminatan). Dengan diterapkannya Kurikulum 2013, pendidikan sejarah tentunya dituntut untuk melakukan pembaruan dalam pengajaran di sekolah, termasuk memperbaharui cara pandang tentang konsep sejarah, *content* (isi atau bahan ajar sejarah), metode mengajar, dan bahkan juga penilaian (*assesement*) dalam pembelajaran sejarah. Konsep berfikir sejarah dalam hal ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan semangat berfikir kritis dalam sejarah, sehingga pembelajaran sejarah semakin dekat dengan semangat ilmiah. Hal tersebutlah yang seharusnya dilakukan agar tidak ada lagi pandangan yang negatif untuk pelajaran sejarah untuk di setiap jenjang terlebih jenjang SMK/MAK yang memang memiliki karakteristik berbeda dengan SMA/MA.

Daftar Pustaka

- Agustinova, D. (2018). Penerapan Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Sejarah Pada Sekolah Menengah Atas. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*. Vol.4 No. 1.
- Alfian, M. (2011). "Pendidikan Sejarah dan Permasalahan yang Dihadapi". *Khazanah Pendidikan*, III(2), 1-8.
- Djojonegoro, W. (1999). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Evans, R. N., & Edwin, L. H. (1978). *Foundation of Vocational Education*. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hasan, S. H. (1994). *Kurikulum Sejarah 1994: Pengertian, Landasan, Pemikiran dan Konsekwensi*. Bandung: Makalah Pada Seminar Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
- Hasan, S. H. (2006). *Pembelajaran Sejarah Yang Mencerdaskan: Mungkinkah?, Pendidikan Sejarah*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pratama, Rinaldo Adi, Maskun, and Nur Indah Lestari. 2019. "Dinamika Pelajaran Sejarah Indonesia Dalam Kurikulum 2013 Pada Jenjang SMK/MAK." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 8 (2): 99–121. <https://doi.org/10.21009/jps.082.02>.
- Sardiman. (2015). "Menakar Posisi Sejarah Indonesia pada Kurikulum 2013". *ISTORIA*, 11(2), 1-13.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sulaiman, S. (2012). "Pendekatan Konsep Dalam Pembelajaran Sejarah". *Lontar*, 9(1), 9-21.
- Suryani, Nunuk. 2013. "Pengembangan Model Internalisasi Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Model Value Clarification Technique." *Paramita: Historical Studies Journal* 23 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/paramita.v23i2.2674>
- Widja, I. G. (2018). "Pembelajaran Sejarah Yang Mencerdaskan: Suatu Alternatif Menghadapi Tantangan dan Tuntutan Jaman Yang Berubah". *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 1(1), 117-134.
- Wijayanti, Y. (2017). "Peranan Penting Sejarah Lokal dalam Kurikulum di Sekolah Menengah Atas". *Jurnal Artefak*, 4(1), 53-6